

# PENEMBAKAN MISTERIUS (PETRUS) DI JAWA TIMUR DALAM PEMBERITAAN SURAT KABAR SURABAYA POST TAHUN 1983-1985

**Putri Regita Cahyaningtias**

Jurusan Pendidikan Sejarah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Negeri Surabaya

Email: [putreregita.20065@mhs.unesa.ac.id](mailto:putreregita.20065@mhs.unesa.ac.id)

**Eko Satriya Hermawan**

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Negeri Surabaya

Email: [ekohermawan@unesa.ac.id](mailto:ekohermawan@unesa.ac.id)

## Abstrak

Penembakan Misterius (petrus) merupakan kebijakan keamanan yang dijalankan pemerintah Orde Baru pada periode 1983-1985 dengan tujuan menekan angka kriminalitas yang merajalela di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur. Kebijakan ini diwujudkan melalui Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) atau Operasi Clurit, yang menyasar preman, residivis, dan kelompok kriminal jalanan. Peristiwa ini menjadi salah satu fenomena penting dalam sejarah politik keamanan Indonesia, dan menarik perhatian media, khususnya Surabaya Post sebagai surat kabar daerah yang intens memberitakan kasus-kasus kriminalitas di Jawa Timur. Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1) Bagaimana latar belakang dan dampak peristiwa penembakan misterius (petrus) di Jawa Timur tahun 1983-1985?. 2) Bagaimana surat kabar Surabaya Post memberitakan peristiwa penembakan misterius (petrus) di Jawa Timur tahun 1983-1985?. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menjelaskan latar belakang dan dampak peristiwa penembakan misterius (petrus) di Jawa Timur tahun 1983-1985. 2) Menjelaskan pemberitaan surat kabar Surabaya Post mengenai peristiwa penembakan misterius (petrus) di Jawa Timur tahun 1983-1985. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi tahap heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber utama penelitian adalah arsip pemberitaan Surabaya Post periode 1983-1985, ditunjang dengan literatur sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu terkait penembakan misterius dan politik keamanan Orde Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan Surabaya Post mengenai Petrus di Jawa Timur lebih menekankan aspek kriminalitas ketimbang aspek politik atau kemanusian. Berita-berita yang dimuat umumnya berupa laporan penemuan mayat misterius dengan ciri-ciri fisik tertentu, tanpa analisis mengenai pelaku maupun motif politik di balik peristiwa tersebut. Framing yang digunakan cenderung menempatkan korban sebagai "bromocorah" atau "residivis", sehingga membentuk opini publik bahwa operasi Petrus adalah langka wajar untuk menegakkan keamanan. Dengan demikian, Surabaya Post berperan tidak hanya sebagai penyampai fakta, tetapi juga sebagai media yang membantu menormalisasikan kebijakan keamanan Orde Baru di mata masyarakat Jawa Timur.

**Kata Kunci:** Penembakan Misterius, Surabaya Post, Jawa Timur, Orde Baru.

## Abstract

*The Mysterious Shootings (Petrus) was a security policy implemented by the New Order government between 1983 and 1985 to suppress the rising crime rate across Indonesia, including in East Java. This policy was carried out through the Crime Eradication Operation (Operasi Pemberantasan Kejahatan/OPK), also known as Operasi Clurit, targeting gangsters, repeat offenders, and street criminals. The Petrus phenomenon became one of the most significant episodes in Indonesia's security politics, drawing media attention, particularly from Surabaya Post, a regional newspaper that intensively reported on criminal cases in East Java. Based on the background of the problem, the research questions of this study are as follows: 1) What were the background and impacts of the mysterious shootings (Petrus) in East Java during 1983–1985?. 2) How did the Surabaya Post newspaper report on the mysterious shootings (Petrus) in East Java during 1983–1985?. The objectives of this study are: 1) To explain the background and impacts of the mysterious shootings (Petrus) in East Java during 1983–1985. 2) To explain how the Surabaya Post newspaper reported on the mysterious shootings (Petrus) in East Java during 1983–1985. This research applies the historical method, consisting of heuristics (source collection), source criticism, interpretation, and historiography. The primary sources are archives of Surabaya Post publications from 1983 to 1985, supported by secondary references such as books, journals, and previous studies on mysterious shootings and New Order security politics. The findings indicate that Surabaya Post's*

*coverage of Petrus in East Java emphasized the criminal aspects rather than political or humanitarian dimensions. Most reports focused on the discovery of unidentified bodies with detailed physical descriptions, without further analysis of perpetrators or political motives behind the events. The framing consistently labeled the victims as “bromocorah” or “repeat offenders,” shaping public opinion that Petrus was a legitimate and necessary measure to maintain security. Thus, Surabaya Post functioned not only as an informer but also as a medium that contributed to normalizing the New Order’s security policy in East Java.*

**Keywords:** Mysterious Shootings, Surabaya Post, East Java, New Order.

## PENDAHULUAN

Masa pemerintahan Presiden Soeharto terdapat banyak peristiwa yang menggemparkan di Indonesia, salah satunya yaitu peristiwa penembakan misterius. Peristiwa penembakan misterius atau *Petrus* terjadi pada tahun 1983-1985. Penembakan misterius adalah sebuah operasi keamanan dari Presiden Soeharto yang sebelumnya telah menargetkan orang-orang dengan label kriminal, seperti anggota geng, mantan napi, serta orang bertato. Orang-orang dengan label tersebut mati atau hilang secara misterius akibat dari adanya peristiwa penembakan misterius.

Peristiwa penembakan misterius didasari oleh adanya kebijakan *Operasi Celurit* pada 1983.<sup>1</sup> Kebijakan tersebut merupakan bentuk tindak tegas Presiden Soeharto dalam menutup aksi kejahatan yang banyak terjadi di daerah-daerah. Aksi kejahatan tersebut banyak menimbulkan ketakutan dikalangan masyarakat umum. Oleh karena itu, untuk meredakan kerisauan yang dirasakan masyarakat, Presiden Soeharto memerintahkan aparat keamanan negara untuk menjalankan langkah-langkah penanganan aksi kejahatan dengan melakukan operasi penumpasan kejahatan bersandi *Operasi Celurit* untuk memberantas kejahatan yang saat itu menyasar pada masyarakat umum. *Operasi Celurit* merupakan operasi yang juga dikenal dengan nama *Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK)* tindakan pemberantasan yang efektif guna menekan kriminalitas di Indonesia pada masa Orde Baru.

Penembakan Misterius di Jawa Timur diawali oleh adanya kerusuhan antara masyarakat Jember dengan tukang tenung atau sanyet dan perkelahian antar bromocorah ‘residivis’ itu sendiri.<sup>2</sup> Hal itu didasari karena banyaknya orang-orang yang memiliki ilmu tenung, dimana masyarakat biasa yang juga bermukim di Jember sangat membenci aktivitas tersebut karena akibat yang ditimbulkan dapat menyebabkan orang lain sakit atau mati. Sedangkan perkelahian antara bromocorah disebabkan oleh tidak meratanya pembagian rejeki serta hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Oleh karena itu, terjadi perkelahian massal antara orang yang memiliki ilmu tenung dan bromocorah dengan masyarakat biasa Jember

karena masyarakat memilih mengeksekusi kasus tersebut tanpa menyerahkan ke pihak kepolisian.

Munculnya kasus tersebut menarik berbagai pihak terutama media massa yang menjadikan topik tersebut sebagai topik utama dalam beritanya. Hal itu karena banyaknya korban yang berjatuhan akibat cekcok dua pihak tersebut dengan masyarakat biasa di Jember. Topik yang diangkat oleh beberapa media terutama surat kabar lokal di Jawa Timur senantiasa menjabarkan setiap perkembangan kasus mengenai peristiwa Jember.

Dalam pemberitaan peristiwa Jember, salah satu surat kabar yang menyorot peristiwa tersebut ialah surat kabar Surabaya Post. Surabaya Post memberitakan peristiwa Jember dengan sangat runut dari awal mula peristiwa yang terjadi di satu kota hingga menjadi sebuah runutan kejadian yang menyeluruh di Jawa Timur. Berita yang diterbitkan pada Senin, 2 Maret 1981, memberitakan “Kejadian-kejadian kronologi di Jember”. Pemberitaan peristiwa bunuh membunuh di Jember yang dilakukan oleh beberapa orang dengan korban dituduh sebagai dukun sanyet-tenung dan meninggal akibat pengeroyan.

Dengan adanya peristiwa di Jember tersebut maka terjadi rentetan peristiwa-peristiwa lainnya yang ada di Jawa Timur seperti di Surabaya, Malang, Madura, Sidoarjo, Jember, Lumajang, Bondowoso, Jombang, Mojokerto, Pasuruan. Hal ini menunjukkan bahwa situasi dan kondisi pada masa Petrus menunjukkan Jawa Timur menjadi wilayah yang sangat mencekam dan menjadi target operasi.

Surabaya Post merupakan surat kabar yang didirikan oleh Abdoel Azis dan Toety Azis sejak 1 April 1953 di Surabaya, Jawa Timur. Surat kabar ini terbit sore setiap hari, termasuk edisi Minggu (kecuali hari libur Nasional tidak terbit), surat kabar ini diterbitkan oleh PT Media Delta Espe. Surabaya Post adalah surat kabar semua golongan. Isi surat kabar Surabaya Post memuat mengenai berita-berita lokal kota Surabaya, Jawa Timur, luar negeri, olah raga, seni, budaya, ekonomi, iklan, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Surabaya Post banyak memberitakan peristiwa Penembakan Misterius, seperti terjadinya kasus hilangnya nyawa seorang bromocorah. Dalam memuat berita terkait

<sup>1</sup> Yustina Devi & Ardiani, “Potret Relasi Gali-Militer di Indonesia (Ingatan Masyarakat Yogyakarta tentang Petrus 1983)”, dalam Jurnal Retorik, Vol.3(1), Desember 2012, hal. 49.

<sup>2</sup> Surabaya Post, 2 Maret 1981. *Kejadian-Kejadian kronologis di Jember*. Hal. 3 kolom 1.

<sup>3</sup> Aming Aminoedhin Blogspot. Kamis, 25 Juli 2024 10.10 WIB. *Sejarah Berdiri Harian Sore Surabaya Post* (Online) <https://aminingaminoedhin.blogspot.com/2012/02/harian-sore-surabaya-post.html> diakses 25 Juli 2024 pukul 10.10 WIB.

penembakan misterius, Surabaya Post sebagai media daerah konsisten memuat berita mengenai adanya korban-korban di wilayah dalam hal ini di kabupaten dan kota di Jawa Timur yang terjadi peristiwa Petrus, meskipun berada dalam tekanan politik pemberitaan yang dimuat dengan bahasa yang hati-hati. Sebagaimana contoh pemberitaan yang diterbitkan oleh Surabaya Post:

*“Dua mayat laki-laki tak dikenal identitasnya dibawah jembatan Kali Manjing, Desa Tirtomarto, Kecamatan Ampelgading (Malang Selatan). Diduga korban pembunuhan dan masih dalam penyelidikan pihak berwajib”.*<sup>4</sup>

Peristiwa ini juga terjadi dalam kasus di wilayah berbeda, juga terjadi peristiwa penembakan misterius. Sebagaimana diberitakan oleh surat kabar Surabaya Post, dalam pemberitaan lainnya, pada waktu yang hampir bersamaan juga terjadi peristiwa di beberapa daerah. Sebagaimana pemberitaan dengan judul artikel “Mayat Tanpa Kepala” yang terjadi di Bangkalan, sebagai berikut:

*“Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan dalam kondisi mengenaskan di pantai Sukolilo Barat, Bangkalan. Mayat tanpa kepala itu memiliki tato bertuliskan “Gubang” dan bergambar naga serta luak di pahanya. Diduga mayat itu bekas residivis. Karena sudah membusuk, mayat langsung dikuburkan di lokasi penemuan, Kampung Jangkar, Kecamatan Labang, Bangkalan”.*<sup>5</sup>

Sebagaimana ini dalam tulisan diatas dalam tulisan tajuk surat kabar Surabaya Post, tentang penemuan mayat tanpa kepala di duga adalah preman yang dibunuh oleh penembak misterius, walaupun Surabaya Post tidak menjelaskan secara spesifik serta dalam tahap penyelidikan polisi setempat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih jauh bagaimana peran Surabaya Post dalam pemberitaan peristiwa penembakan misterius yang ada di Jawa Timur tahun 1983-1985. Dan dari terjadinya peristiwa tersebut yang kurang adanya pemberitaan pada surat kabar di wilayah Surabaya serta Jawa Timur dari pada pemberitaan surat kabar di daerah Jawa Tengah atau pada lingkup Jakarta dan sekitarnya menjadikan dasar penulis mengangkat penelitian dengan judul “Penembakan Misterius (Petrus) di Jawa Timur Dalam Pemberitaan Surabaya Post Tahun 1983-1985”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang memiliki empat tahapan, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan historiografi.

Tahap pertama yaitu heuristik atau pengumpulan sumber adalah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan sumber atau data sejarah. Sumber sejarah yang dikumpulkan peneliti secara relevan dengan topik yang dibahas termasuk sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan yaitu arsip berupa media massa Surabaya Post adapun media massa lainnya yang

digunakan tidak dalam presfektif sudut pandang Surabaya Post dalam memberitakan tetapi menguatkan bagaimana peristiwa penembakan misterius khususnya surat kabar terbitan sejaman tahun 1983-1985 yang memberitakan peristiwa penembakan misterius seperti Jawa Post, Surabaya Ekspres, dan Harian Sore Radar Kota. Selanjutnya, sumber sekunder diperoleh dari buku-buku, serta jurnal terkait dengan topik yang memberitakan terkait peristiwa penembakan misterius yang terjadi pada tahun 1983-1985 yang di dapatkan dari Perpustakaan Medayu Agung, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, Toko Buku di Jalan Semarang.

Tahap kedua yaitu kritik sumber merupakan tahap menilai terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh dan dibutuhkan dalam penulisan sejarah. Terdapat dua bentuk kritik sumber, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Pada penelitian ini, kritik yang digunakan adalah kritik intern yang menelaah isi sumber. Karena sumber yang diteliti adalah peristiwa yang memerlukan sumber utama seperti, surat kabar, arsip, dan buku-buku pendukung yang berhubungan dengan subjek yang diteliti.

Tahap ketiga yaitu interpretasi atau menghubungkan antar fakta. Dalam tahapan ini penulis melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta yang didapatkan dari sumber primer dan sumber sekunder. Serta menetapkan makna dan saling hubungan daripada fakta-fakta yang diperoleh.

Tahap terakhir yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Tahap ini mencakup cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang telah diuji oleh dewan penguji skripsi. Peneliti memberikan gambaran yang jelas tentang proses penelitian yang dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, gambaran ini disusun secara sistematis, terdiri dari tiga bagian: 1) pengantar, 2) hasil penelitian, dan 3) kesimpulan. Setiap bagian disusun menjadi bab-bab yang berhubungan satu sama lain, sehingga peneliti dapat menyajikan penulisan sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penembakan misterius adalah operasi pada masa Orde Baru tahun 1983-1985 yang dijalankan aparat keamanan atas perintah Presiden Soeharto untuk memberantas kriminalitas yang tinggi di masyarakat. Operasi yang dikenal juga sebagai Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK), menggunakan metode *shock therapy* dengan meninggalkan mayat korban di tempat umum sebagai peringatan. Meskipun berhasil menekan angka kejahatan dan menimbulkan rasa aman sementara, operasi ini memunculkan ketakutan baru di masyarakat serta dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena melibatkan pembunuhan sistemasti oleh aparat negara melalui eksekusi di luar proses hukum.

### A. Latar Belakang Penembakan Misterius

Indonesia memasuki tahun 1980-an dihadapkan dalam situasi sosial dan politik yang cukup tegang di

<sup>4</sup> Surabaya Post, 29 Juni 1983. *Dua Mayat di Bawah Jembatan*. Hal. 3 kolom 3.

<sup>5</sup> Surabaya Post, 29 Juni 1983. *Mayat Tanpa Kepala*. Hal. 3 kolom 3.

bawah pemerintahan otoriter Presiden Soeharto yang bekuasa sejak tahun 1966. Pada masa Orde Baru mengutamakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi Indonesia. Alasan dari pada kedua indikator tersebut bahwa pemerintahan Orde Baru sejak awal berkeyakinan, bahwa pembangunan ekonomi merupakan prioritas utama dalam kehidupan nasional. Sehingga dengan ekonomi yang berkembang maju, maka rakyat Indonesia akan dijauhkan dari bahaya komunisme, sehingga dapat diatasi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang dilandasi oleh stabilitas politik nasional merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.<sup>6</sup>

Bersamaan dengan pembangunan ekonomi, negara juga membangun bidang politik, yang dikonsepsikannya sebagai stabilitas politik, yaitu suatu kondisi di mana keamanan dalam negeri harus tetap terjaga, tidak ada oposisi dari kelompok-kelompok sipil warga masyarakat atau kekuatan-kekuatan politik lain. Diasumsikannya, stabilitas politik ini adalah prasyarat imperatif bagi kelancaran pembangunan ekonomi. Sudah tentu untuk bisa mewujudkannya stabilitas politik ini negara melakukan berbagai tindakan represif bagi siapa pun yang dipersepsikannya bisa mengganggu jalannya pembangunan ekonomi atau umumnya keamanan negara.

Strategi pembangunan ekonomi yang memprasyaratkan stabilitas politik melalui tindakan “kekerasan” yang dipraktekkan oleh suatu negara disebut sebagai rezim pembangunan yang represif (*repressive developmental rezim*), yang ciri-cirinya adalah: pemerintahan pada berbagai level, mulai dari atas sampai ke bawah, melibatkan kaum militer; pembangunan ekonomi diatur oleh para teknokrat dan elit birokrasi dengan sistem perencanaan terpusat; lembaga-lembaga demokrasi yang konvensional, seperti partai politik dan legislatif, serta kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam masyarakat dibatasi ruang gerak dan kegiatannya.<sup>7</sup>

Kebijaksanaan pembangunan yang terkonsentrasi di kota-kota besar menyebabkan ketimpangan antara daerah kota dan pedesaan, yang membuat beberapa golongan ekonomi memperoleh keuntungan dari pembangunan ini, tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia tetap terbelenggu dalam kemiskinan. Kesenjangan sosial ini sangat terlihat di kota-kota seperti Jakarta. Keadaan semakin diperparah oleh tingginya angka kemiskinan dan penggaguran yang memaksa banyak orang untuk hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Kondisi perekonomian yang tidak stabil ini secara bertahap menimbulkan ketidakpuasan umum yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya kejahatan jalanan dan ketidakstabilan sosial. Angka kejahatan di kota-kota besar melonjak seiring dengan peningkatan ketimpangan sosial.<sup>8</sup>

Kejahatan jalanan seperti perampokan, pencurian, pemerasan, dan kekerasan di ruang publik semakin meresahkan masyarakat. Banyak dari pelaku kejahatan ini

adalah bekas residivis yang muncul dengan julukan seperti gali, jeger, bromocorah, preman, dan sebagainya yang biasanya menguasai lahan parkir, toko, pasar, dan tempat hiburan malam kemudian melakukan beberapa tindakan kejahatan. Seperti merampok, mencuri, membegal bahkan membunuh siapa saja untuk mendapatkan rampasan mereka menciptakan teror ditengah resahnya masyarakat.<sup>9</sup>

Premanisme yang merajalela ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat tetapi juga memperburuk citra pemerintah yang dianggap gagal mengatasi masalah sosial dan untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah Orde Baru mengambil pendekatan yang sangat represif. Kebijakan pemerintah Orde Baru memang seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan aparat negara untuk menjaga kontrol politik dan hal tersebut seringkali dengan cara-cara yang tidak sah atas cara-caranya itu juga lah pemerintah Orde Baru baik di dalam negeri dan di luar negeri semakin dikenal dengan pendekatannya yang otoriter. Pendekatan yang keras ini tidak hanya ditujukan pada pelaku kriminal biasa tetapi juga kepada siapa saja yang dianggap mengancam stabilitas politik termasuk oposisi terhadap pemerintah.<sup>10</sup>

Penembakan misterius atau yang lebih dikenal dengan nama Petrus mulai muncul pada tahun 1983 ketika serangkaian penembakan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan atau kriminal terjadi di berbagai kota besar di Indonesia. Petrus sendiri sebenarnya merupakan istilah yang diciptakan oleh masyarakat dan media massa sementara dalam operasi resmi ABRI, Kepolisian dan pemerintah Orde Baru menyebutnya sebagai Operasi Celurit yang dikemas dengan nama Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK). Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) kemudian diikuti oleh Polri maupun ABRI yang ada di kota-kota lain seperti Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang hingga Samarinda.

Operasi ini tidak hanya ditujukan untuk menindak pelaku kejahatan, melainkan juga untuk menginventarisasi nama-nama pelakunya. Yogyakarta dan wilayah Jawa Tengah disebut-sebut sebagai daerah pertama yang melakukan operasi terhadap para preman dan bandit beserta gengnya sebelumnya operasi celurit diberlakukan pada bulan Januari 1983 dan sejak saat itu mayat-mayat misterius mulai ditemukan masyarakat di sejumlah tempat seperti jalan raya, sungai, pasar, atau lahan permukiman. Nyaris setiap hari ditemukan mayat tidak dikenal yang tergeletak di jalanan, mereka dicap sebagai gali singkatan dari gabungan anak liar yang mengistilahkan orang-orang bertato yang melakukan kejahatan, ketika korban ditemukan ciri-ciri umumnya dalam kondisi luka di kepala dan leher dengan tangan terikat mereka juga biasanya memiliki tato di tubuh yang umumnya di tempuh aparat saat melakukan razia resmi untuk menjaring pelaku kejahatan.

<sup>6</sup> Affan Gaffar, “Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 1999), hal. 148.

<sup>7</sup> *Op.cit.* Budi Rajab, hal. 184.

<sup>8</sup> Mubyarto, “Siklus Tujuh Tahun Ekonomi Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia”, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 16 (3), Oktober 2001, hal. 252.

<sup>9</sup> Taufik Effendy, “Premanisme dan Pembangunan Politik di Indonesia”, dalam Jurnal Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol. 5 (9), Januari-Juni 2013, hal. 58.

<sup>10</sup> *Ibid*, Taufik Effendy, hal. 60.

Penembakan misterius ini biasanya menargetkan para kriminal yang sering terlibat dalam kejahatan jalanan atau tindakan kekerasan lainnya. Namun yang mengejutkan adalah banyaknya korban yang tidak jelas keterlibatannya dalam kriminal yang mengarah ada spekulasi bahwa penembakan ini merupakan bagian dari kebijakan negara untuk menanggulangi musuh-musuh pemerintah yang tidak jelas bentuknya.

Penembakan-penembakan ini seringkali dilakukan tanpa proses hukum yang jelas sehingga memunculkan kecurigaan bahwa aparat keamanan termasuk kepolisian dan militer terlibat dalam operasi ini banyak saksi mata yang melaporkan bahwa korban-korban petrus ditembak di tempat tanpa peringatan dan tanpa adanya pemeriksaan hukum yang sah. Banyak saksi mata juga yang mengungkapkan bahwa penembakan seringkali dilakukan dengan cara yang sangat sistematis dan terkoordinasi dengan korban di tembak di tempat umum atau di jalanan yang ramai hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa penembakan ini tidak dilakukan oleh individu atau kelompok biasa melainkan oleh pihak yang memiliki akses terhadap senjata api dan itu pasti adalah aparat negara. Di tengah berlangsungnya penembakan-penembakan ini reaksi masyarakat Indonesia cukup beragam, sebagian besar masyarakat terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar merasa takut dan cemas akan keselamatan diri mereka sebab dengan cepat fenomena petrus ini menciptakan atmosfer ketakutan yang luar biasa di kalangan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa mereka hidup dalam ketidakpastian karena siapa saja bisa menjadi korban tanpa sebab yang jelas namun di sisi lain sebagian orang melihat fenomena Petrus sebagai upaya untuk membersihkan kota dari kejahatan yang semakin merajalela.

## B. Pelaksanaan Penembakan Misterius di Jawa Timur

Tindak kejahatan di Jawa Timur tahun 1983 makin meningkat baik kuantitas maupun kualitas dari tahun sebelumnya. Tingkat kejahatan yang meningkat dan para pelaku tambah berani, dengan disertai tindak kekerasan. Sumber penyebab terjadinya tindak kejahatan tersebut banyak dilatar belakangi motif sosial dan ekonomi. Di samping itu pula, kesempatan juga turut pula memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan dan watak seseorang yang sudah rusak akibat pergaulan dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Dalam menghentikan tindak kejahatan yang sangat tinggi intensitasnya maka pihak Kepolisian Jawa Timur segera bertindak untuk menangani kejahatan ini secara tuntas. Dasar landasanya, yaitu "Operasi Clurit" di Jakarta oleh Pangkopamtib, Laksamana TNI Sudomo, serta

pelaksanaan "Operasi Imbangan" di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Mulailah berlangsung "Operasi Penumpasan Kejahatan" di wilayah Yogyakarta, yang merupakan pola tindak kejahatan tegas pertama secara massal terhadap kejahatan.<sup>12</sup>

Operasi Clurit yang dilaksanakan di seluruh Jawa Timur sejak tanggal 21 Januari 1983 saat ini masih diteruskan dan akan ditingkatkan dengan harapan masyarakat dapat memberikan partisipasinya dalam upaya untuk lebih mewujudkan rasa aman dan tenteram. Operasi ini dilaksanakan polri atas perintah Laksusda merupakan operasi imbangan terhadap operasi serupa yang dilancarkan Kopkamtib di Jakarta dalam upaya menanggulangi dan menutup semua bentuk kejahatan dan tindakan-tindakan lain yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat.<sup>13</sup> Penerapan operasi penanggulangan kejahatan di Jawa Timur sama seperti di Yogyakarta. Jember merupakan wilayah pertama yang lebih dulu mengadakan operasi tersebut.<sup>14</sup>

Sasaran operasi ini adalah para bandit serta pelaku kejahatan lainnya. Pemerikatan jumlah bromocorah di Jawa Timur, berturut-turut di wilayah Malang, Surabaya, Jombang, Probolinggo, Lumajang dan sisanya tersebar di daerah-daerah Jawa Timur lainnya.<sup>15</sup> Ragam kejahatan di Jawa Timur, antara lain pencurian biasa dengan pemberatan, penganiayaan ringan, perkosaan, penganiayaan berat, pencurian dengan kekerasan, pencurian kayu jati, pencurian kendaraan bermotor, pencurian hewan ternak, dan penyalahgunaan narkotika.<sup>16</sup>

Operasi Penumpasan Kejahatan sudah menurut prosedur hukum. Penjahat yang tidak menyerah pada saat penangkapan diberi peringatan terlebih dahulu, jika mereka tidak menyerah malah melawan dan membahayakan, maka karena terpaksa ditembak. Penggunaan kekerasan memang efektif untuk menutup kejahatan dan tindak pidana lain, namun hal itu tetap dilakukan dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan. Perlakuan terhadap pelaku kejahatan dengan maksud yang baik sebagai suatu kepentingan rakyat.<sup>17</sup>

Beberapa penyebab perkara tindak kejahatan di Jawa Timur dapat ditekan melalui upaya berikut: *Pertama*, pastisipasi masyarakat yang ikut serta mempertanggungjawabkan keamanan sekitar lingkungannya, yaitu dengan cara meningkatkan kegiatan Siskamling (sistem keamanan lingkungan). *Kedua*, aparat keamanan, patroli petugas keamanan secara teratur dan selalu dilakukan peningkatan khusus di daerah rawan dan aparat keamanan yang mendata bormocorah agar pihaknya lebih mudah mengadakan pembinaan. *Ketiga*, semakin

<sup>11</sup> Surabaya Post, 27 Januari 1983. *Komisi I DPR: Situasi Hankam di Jatim Cukup Mantap Namun Kualitas dan Kuantitas Kejahatan Meningkat*. Hal. 1 kolom 5.

<sup>12</sup> Surabaya Post, 20 Januari 1983. "Operasi Clurit" Segera Dilancarkan Untuk Menghadapi Tindak Kejahatan. Hal. 1 kolom 4.

<sup>13</sup> Surabaya Post, 12 Februari 1983. *Situasi Jatim Cukup Mantap*. Hal. 2 kolom 2.

<sup>14</sup> Surabaya Post, 30 April 1983. *Bromocorah Seluruh Jatim*

*Didata*. Hal. 2 kolom 2.

<sup>15</sup> Surabaya Post, 1 Juli 1983. *Sepertiga dari Jumlah 2.574 Orang Bromocorah Jatim, Terbanyak di Kowil Malang*. Hal. 1 kolom 1.

<sup>16</sup> Surabaya Post, 23 November 1984. *Menurun, Kejahatan dengan Senjata Api*. Hal. 2 kolom 8.

<sup>17</sup> Surabaya Post, 21 Mei 1983. *Pangab-Pangkopamtib Benny Moerdani: Laksusda Diberi Wewenang Menutup Kejahatan*. Hal. 1 kolom 1.

banyaknya para residivis berada dalam tahanan menjalani hukuman. *Keempat*, Pemerintah Daerah atau melalui Dinas Sosial mengatasi permasalahan terhadap pelaku tindak kejahatan dengan diberi bimbingan dan pendekatan seperti di beberapa kabupaten Jawa Timur bromocorah seperti, ditatar keterampilan kerja serta digalakkan transmigrasi.

Dari temuan data pada surat kabar Surabaya Post, perkara kriminalitas terbanyak di Jawa Timur berturut-turut daerah terjadi di wilayah, seperti; *Pertama*, di wilayah meliputi Surabaya, Sidoarjo, Malang, Gresik, Mojokerto, Jombang dan Tuban, Lamongan (Arekan) tindak kejahatan seperti pencurian harta benda, pencurian sepeda motor, perampukan, penodongan, perampasan, narkotika, dan pencurian kayu jati. *Kedua*, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, dan Bondowoso (Pandalungan) perbuatan tindak kriminal seperti pencurian sepeda motor, perampukan, pejambretan. *Ketiga*, wilayah Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Blitar Ngawi, Madiun, Pacitan, Magetan, Ponorogo dan Bojonegoro (Jawa Mataraman) berbagai jenis kejahatan yang terjadi seperti pencurian kayu, perampukan, pencurian sepeda motor, dan pencurian hewan ternak. *Kempat*, Madura tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat yaitu pencurian hewan ternak, pencurian sepeda motor, penodongan, perampukan, perampasan.

### C. Pemberitaan Surabaya Post Terhadap Penembakan Misterius

Awal dekade 1980-an menjadi massa yang penuh ketegangan dalam lanskap sosial dan politik Indonesia. pemerintah Orde Baru sedang giat menegakkan stabilitas nasional melalui pendekatan keamanan yang represif. Di tengah kampanye “penertiban” terhadap kriminalitas, muncullah fenomena Penembakan Misterius; yang lebih dikenal masyarakat dengan istilah Petrus. Istilah Petrus merujuk pada penembakan yang dilakukan oleh pihak tak dikenal terhadap orang-orang yang dicap sebagai preman atau residivis, tanpa proses hukum yang jelas. Fenomena ini pertama kali mendapat sorotan publik pada 1983, ketika media mulai memberitakan penemuan mayat laki-laki bertato dengan luka tembak, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur.<sup>18</sup>

Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang paling terdampak oleh fenomena ini, khususnya kota-kota besar seperti Surabaya dan Malang. Surat kabar Surabaya Post menjadi media lokal yang aktif melaporkan berbagai kejadian petrus di Jawa Timur sejak tahun 1983. Dalam rentang waktu 1983 hingga 1985, laporan demi laporan tentang penemuan mayat tanpa identitas dengan luka tembak mengisi halaman berita kriminal. Penembakan misterius tidak hanya terjadi di kota besar, melainkan juga merambah ke daerah-daerah pinggiran dan pedesaan di Jawa Timur.

Mayoritas korban ditemukan dalam keadaan meninggal, tetapi ada pula beberapa korban berhasil

selamat meski menderita luka tembak serius. Tahun 1983 menjadi tahun yang paling banyak mencatat peristiwa penemuan mayat misterius dengan luka tembak di Jawa Timur. Di Surabaya, sejumlah mayat ditemukan di pinggir jalan, selokan, atau tanah kosong dengan kondisi mengenaskan. Pola luka tembak hampir selalu beragam, yaitu tembakan di dada, kepala, atau perut yang menunjukkan eksekusi dari jarak dekat.

Di antara korban yang ditemukan, sebagian besar adalah laki-laki usia dewasa, mengenakan pakaian lusuh, dan bertato; ciri yang saat itu diasosiasikan dengan preman atau residivis. Ada beberapa kasus di mana korban diketahui memiliki catatan kriminal, namun sebagian lainnya tidak teridentifikasi hingga berhari-hari setelah ditemukan. Kabupaten Jember menjadi wilayah kedua dengan jumlah kasus Petrus terbanyak di Jawa Timur setelah Probolinggo. Di Jember, mayat-mayat korban seringkali ditemukan di jalan, serta ruang publik.

Pada Januari 1983, Surabaya Post melaporkan penemuan dua mayat laki-laki pria bertato di sungai Sidoarjo. Keduanya mengalami luka tembak di bagian dada dan kepala. Di Banyuwangi, kasus Petrus mulai muncul pada pertengahan 1983 dengan pola serupa, yaitu korban laki-laki bertato ditemukan dalam keadaan tewas tertembak. Tahun 1983 juga menjadi titik awal kekhawatiran masyarakat akan operasi keamanan yang dilakukan secara diam-diam oleh negara. Di beberapa pemberitaan, masyarakat menyebut bahwa korban adalah “orang luar” yang tak dikenal, memperkuat dugaan bahwa korban sengaja “dibuang” ke wilayah tertentu.

Tahun 1984, intensitas pemberitaan mengenai Petrus sedikit menurun, namun peristiwa penembakan dan penemuan mayat masih terus berlangsung. Wilayah Tulungagung dan Jember mulai mencatat kasus serupa di tahun ini, menandai perluasan operasi ke daerah Selatan dan Timur Jawa Timur. Di Bondowoso, korban ditemukan di sekitar ladang tebu, memperlihatkan pola pembuangan yang sengaja dilakukan di tempat terpencil. Tahun 1984 juga ditandai dengan munculnya korban yang selamat dan mampu memberikan kesaksian, meski informasi yang didapat sangat terbatas.

Salah satu korban selamat mengaku ditembak setelah ditangkap oleh orang tak dikenal, namun tidak tahu siapa pelakunya atau motifnya. Kesaksian korban ini menjadi bukti penting bahwa penembakan tidak dilakukan secara acak, tetapi terencana dan sistematis. Di kota Kediri dan Nganjuk, penemuan mayat korban “Petrus” mulai terjadi sejak pertengahan 1984 hingga akhir tahun. Pola penemuan masih konsisten pria tanpa identitas, luka tembak di tubuh, bertato, dan ditemukan di tempat umum.

Dalam banyak kasus, tidak ditemukan senjata atau barang bukti di sekitar korban yang bisa menjelaskan dugaan baku tembak. Hal ini memperkuat dugaan bahwa korban tidak melawan, melainkan ditembak secara sepihak tanpa perlawan. Tahun 1985, jumlah kasus “Petrus” mulai berkurang, setidaknya dari pemberitaan media. Namun, bukan berarti fenomena tersebut berhenti sepenuhnya. Di Situbondo dan Banyuwangi, kasus-kasus

<sup>18</sup> Surabaya Post, 1 September 1983. *Kapolri: Utamakan Penanganan Kejahatan yang Langsung Meresahkan Masyarakat*. Hal. 4

penemuan mayat dengan ciri khas Petrus masih terjadi.

Pada Januari 1985, ditemukan mayat pria tertembak di Banyuwangi. Tubuhnya sudah membusuk dan tidak diketahui identitasnya. Keberadaan korban yang dibuang di lokasi terpencil menunjukkan adanya upaya penghilangan jejak dan menghindari sorotan publik. Beberapa korban Petrus diketahui berasal dari luar daerah tempat mereka ditemukan, menandakan adanya mobilisasi korban sebelum dieksekusi. Data pemberitaan menunjukkan bahwa operasi "Petrus" tidak hanya "membersihkan" wilayah, tetapi juga menyebarkan efek psikologis berupa ketakutan luas.

Fenomena ini mendorong banyak preman dan mantan narapidana menyerahkan diri ke kantor polisi karena takut menjadi target. Di Surabaya, aparat keamanan dan pemerintah daerah bahkan membuat seruan agar orang-orang bertato atau "bermasalah" membersihkan diri dan tidak berke liaran. Stereotip terhadap pria bertato semakin menguat selama masa "Petrus", membuat banyak orang takut meskipun tidak memiliki riwayat kriminal. Dalam beberapa pemberitaan, aparat keamanan menyatakan bahwa korban adalah kriminal, tetapi tanpa bukti hukum atau proses peradilan.<sup>19</sup>

Aparat tidak pernah menjelaskan secara detail siapa pelaku penembakan, atau dasar hukum yang membenarkan tindakan tersebut. Ketiadaan transparansi ini menunjukkan bahwa Petrus merupakan bagian dari strategi pengendalian sosial melalui kekerasan tersembunyi. Korban Petrus yang masih hidup umumnya tidak berbicara banyak kepada pers karena trauma atau tekanan. Mereka yang selamat menggambarkan peristiwa penangkapan yang tiba-tiba, diborgol, dibawa dalam mobil, lalu ditembak dan ditinggalkan.

Di antara para korban selamat, tidak semua berani melapor. Ketakutan terhadap pembalasan atau kriminalisasi lebih lanjut menjadi alasannya. Pemberitaan Surabaya Post juga mencatat bahwa jenazah-jenazah korban kerap tidak diambil keluarga selama berhari-hari. Dalam beberapa kasus, korban akhirnya dimakamkan sebagai "mayat tak dikenal" oleh aparat desa atau rumah sakit. Di RS dr. Soetomo, Surabaya, tercatat ada beberapa jenazah Petrus yang tidak pernah diidentifikasi hingga dimakamkan massal.<sup>20</sup>

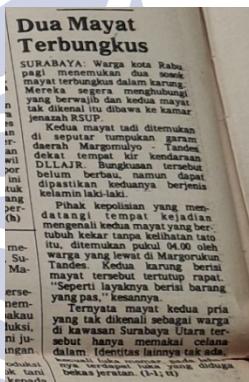
Hal ini menambah ironi dari operasi Petrus; korban tewas tanpa identitas, tanpa kejelasan hukum, dan tanpa proses peradilan. Dalam banyak pemberitaan, keluarga korban mengaku tidak mengetahui keberadaan korban selama berminggu-minggu sebelum mayatnya ditemukan. Keadaan ini menunjukkan bahwa korban Petrus tidak selalu "beroperasi" sebagai kriminal di tempat mereka ditemukan. Operasi Petrus di Jawa Timur berlangsung dalam gelombang yang terlihat jelas dalam pemberitaan media, terutama tahun 1983.

Penyebaran wilayah juga memperlihatkan pola dari kota besar, menyebar ke kota kecil, lalu ke desa-desa pinggiran. Wilayah Barat Jawa Timur (Madiun, Ngawi, Pacitan) cenderung lebih sedikit diberitakan dibanding wilayah Timur dan Selatan. Hal ini kemungkinan karena

tingkat kriminalitas, kepadatan penduduk, atau keterjangkauan oleh media lokal. Di antara semua kota, Surabaya menjadi episentrum dari pemberitaan dan kasus Petrus, baik dari sisi jumlah maupun perhatian publik.

Surabaya Post adalah surat kabar sore yang terbit di Jawa Timur sejak 1953 dan dikenal dekat dengan masyarakat perkotaan Jawa Timur. Pada era 1980-an, surat kabar ini berperan penting dalam menyajikan informasi lokal, termasuk kasus-kasus kriminalitas yang marak. Karena berada di daerah, Surabaya Post menjadi salah satu media yang cukup intens memberitakan fenomena penembakan misterius (Petrus) di Jawa Timur, berbeda dengan surat kabar nasional yang lebih fokus pada lingkup Jakarta. sehingga Surabaya Post berperan sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat daerah.

Surabaya Post cenderung menyajikan berita dengan gaya reportase langsung dan deskriptif. Surabaya Post lebih menekankan sisi kriminalitas dalam pemberitaan Petrus. Berita-berita yang dimuat umumnya berupa laporan penemuan mayat misterius di jalan, sungai, atau tempat umum. Ciri-ciri korban digambarkan detail seperti tato, pakaian, atau kondisi tubuh namun tanpa analisis mendalam mengenai penyebab politik atau aktor pelaku.



Gambar 1. Topik Surat Kabar

Sumber : Surabaya Post, 7 September 1983 (Dua Mayat Terbungkus)

Surabaya sebagai pusat pemerintahan provinsi dan pusat ekonomi di Jawa Timur, Surabaya menjadi fokus utama implementasi kebijakan penumpasan kriminalitas pada masa Petrus. Strategi yang diambil aparat ditingkat lokal menitikberatkan pada patroli gabungan yang dilakukan oleh kepolisian dan unsur militer di titik-titik rawan, seperti terminal Joyoboyo, Pelabuhan Tanjung Perak, pasar malam, dan kawasan hiburan malam yang rawan terjadi transaksi ilegal. Selain patroli, razia identitas dan senjata tajam menjadi kegiatan rutin, terutama pada malam hari. Eksekusi terhadap target kerap dilakukan di lokasi yang mudah terlihat publik untuk memberikan efek jera bagi komunitas sekitar. Contoh kasus yang mencuat adalah penemuan dua sosok mayat terbungkus dalam karung. Kedua mayat ditemukan di seputar tumpukan garam daerah Margomulyo-Tandes. Mayat berjenis kelamin laki-laki terdapat luka memar pada leher yang

<sup>19</sup> Surabaya Post, 23 Januari 1984. *Yang Pernah Melakukan Kejahatan Menyerahlah*. Hal. 2 kolom 2.

<sup>20</sup> Surabaya Post, 26 Juni 1984. *Mayat Tak Dikenal Dikubur di Putat Jaya*. Hal. 2 kolom 2.



Salah satu kasus yang memicu perhatian luas adalah penemuan sesosok mayat lelaki tanpa identitas dalam kondisi mengenaskan di pantai Sukolilo Barat, Bangkalan. Mayat tanpa kepala itu memiliki tato bertuliskan “Gubang” dan bergambar naga serta luak di pahanya. Diduga mayat itu bekas residivis.<sup>24</sup>

Kabupaten Sumenep terdapat salah satu kasus, ditemukannya dua orang yang tewas, orang pertama merupakan Carik desa Tambaagung Timur, Kec. Ambunten yang ditemukan tewas di desa Dasuk Timur dengan tanda-tanda luka di leher akibat jeratan dan memar dibagian paha. Korban selanjutnya, penduduk desa Dapenda, Kec. Batang ditemukan tewas beberapa kilo meter dari rumahnya, terdapat luka tertembus peluru di dada sebelah kiri dan leher. Siapa pembunuhnya masih dalam penyidikan pihak yang berwajib.<sup>25</sup>

Kabupaten Pamekasan dalam waktu berdekatan, tiga mayat lelaki ditemukan di berbagai lokasi di Pamekasan, dua diantaranya diduga tewas akibat luka tembak. Korban merupakan penduduk Kampung Kleker desa Bajur, Kec. Waru dan Kampung Kongbrangkong desa Plakpal, Kec. Pegantenan. Seorang korban lainnya tidak diketahui identitasnya ditemukan di desa Ambat, Kec. Tlanakan, dalam kondisi mengenaskan seperti kaki dan tangan terikat tali plastik dan terdapat bekas jeratan di leher.<sup>26</sup>

Sebagai bagian dari pers Orde Baru, Surabaya Post memberitakan Petrus dengan narasi yang cenderung mendukung operasi keamanan pemerintah. Dalam banyak pemberitaan, korban Petrus sering dilabeli sebagai bromocorah, residivis, atau preman. Labelisasi semacam ini membuat pembaca diarahkan untuk percaya bahwa korban memang kriminal yang pantas menjadi sasaran operasi. Dengan demikian, Surabaya Post tidak sekadar memberitakan, tetapi juga membungkai peristiwa agar selaras dengan narasi keamanan negara.

Surabaya Post tidak memiliki ruang untuk secara terbuka mengkritik keterlibatan pemerintah atau aparat keamanan terkait kasus Petrus. Tidak ada menyebut tentang operasi khusus, perintah pemerintah, atau pelanggaran hukum. Pemberitaan lebih berfungsi sebagai penyampai informasi kriminal, bukan sebagai alat kontrol sosial. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pers Orde Baru yang diawasi ketat oleh Departemen Penerangan. Sistem SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) memaksa media untuk berhati-hati, sehingga pemberitaan Surabaya Post hanya menjadi “penyampai fakta” tanpa kritik. Inilah gambaran khas pers Orde Baru: “aman, terkontrol, dan tidak frontal.”

Dengan gaya pemberitaan seperti itu, Surabaya Post ikut membentuk opini masyarakat Jawa Timur bahwa Petrus adalah langkah tegas pemerintah yang sah untuk menekan kriminalitas. Masyarakat Jawa Timur yang membaca berita-berita tersebut melihat fenomena mayat bergelimpangan bukan sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai bukti keberhasilan operasi keamanan. Contoh pemberitaan mengenai berbagai jenazah di

berbagai daerah di Jawa Timur memperkuat opini publik bahwa para korban memang penjahat. Dengan demikian, Surabaya Post berperan penting dalam menormalisasi kebijakan Petrus di mata masyarakat Jawa Timur.

Dari sudut pandang pemberitaan Surabaya Post, peristiwa Petrus 1983–1985 diposisikan sebagai isu kriminalitas dan keamanan bukan isu politik atau kemanusiaan. Media ini berfungsi sebagai corong informasi yang mendukung kebijakan pemerintah Orde Baru dengan menampilkan citra korban sebagai kriminal, menekankan pada rasa aman masyarakat, dan meniadakan wacana soal aktor atau legalitas. Gaya jurnalistik yang faktual-deskriptif, tanpa kritik, mencerminkan keterbatasan pers 1980-an yang berada dalam tekanan rezim. Pemberitaan Surabaya Post pada akhirnya turut memperkuat legitimasi operasi Petrus di Jawa Timur dan membentuk opini publik yang cenderung menerima kebijakan tersebut sebagai langkah wajar demi stabilitas dan ketertiban masyarakat.

#### D. Dampak Penembakan Misterius Tahun 1983-1985

Penembakan misterius (petrus) di Jawa Timur yang terjadi pada masa Orde Baru memiliki dampak signifikan, meliputi dampak positif dan negatif diantaranya adalah

a) Dampak Positif

1. Menurunkan Tingkat Kriminalitas

Pelaksanaan operasi Petrus terbukti efektif dalam menurunkan angka kriminalitas, khususnya tindak kejahatan jalanan seperti perampokan, pencurian, dan pembegal. Pelaku kajahatan yang sebelumnya merajalela mulai berkurang drastis karena banyak di antaranya menjadi korban penembakan. Hal ini membuat kondisi sosial di berbagai kota besar di Jawa Timur, seperti Surabaya, Malang, dan Jember, relatif lebih terkendali. Pemerintah Orde Baru menggunakan fakta ini sebagai bukti keberhasilan kebijakan keamanan.

2. Meningkatkan Rasa Aman di Masyarakat

Masyarakat yang sebelumnya resah akibat maraknya aksi kriminal mulai merasakan suasana yang lebih tenang menjalankan aktivitas sehari-hari. Hilangnya sejumlah tokoh kriminal membuat ruang publik, pasar, dan jalan raya kembali bisa diakses dengan rasa aman. Bagi sebagian masyarakat, meskipun metode yang digunakan represif, hasilnya memberi rasa lega karena mereka tidak lagi merasa dibayang-bayangi ancaman pelaku kejahatan. Kedua ini memperkuat persepsi bahwa tindakan tegas pemerintah diperlukan untuk menjaga ketertiban.

3. Memperkuat Wibawa Pemerintah

Melalui operasi Petrus, rezim Orde Baru berhasil menunjukkan citra sebagai pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Soeharto dan aparat keamanan dianggap mampu menindak tegas segala bentuk

<sup>24</sup> Surabaya Post, 29 Juni 1983. *Mayat Tanpa Kepala*. Hal. 3 kolom 3.

<sup>25</sup> Surabaya Post, 6 Oktober 1983. *Dua Orang Ditemukan*

*Tewas*. Hal. 3 kolom 5.

<sup>26</sup> Surabaya Post, 24 Oktober 1983. *Lagi, Tiga Mayat di Pamekasan*. Hal. 3 kolom 4

- gangguan terhadap stabilitas negara. Dengan menampilkan diri sebagai “pelindung rakyat” dari ancaman kriminal, pemerintah berhasil memperoleh dukungan sebagian kalangan masyarakat. Politik keamanan yang keras ini sekaligus menjadi sarana legitimasi kekuasaan rezim Orde Baru.
4. Mendukung Stabilitas Politik dan Ekonomi
- Keamanan yang relatif terjaga setelah operasi Petrus memberikan ruang bagi kelancaran pembangunan ekonomi. Investor merasa lebih aman untuk menanamkan modalnya karena angka kriminalitas yang sebelumnya tinggi dapat ditekan. Stabilitas politik pun lebih mudah dijaga karena pemerintah berhasil menyingkirkan faktor sosial yang dianggap mengganggu. Dengan demikian, kebijakan keamanan ini turut menopang strategi pembangunan ekonomi Orde Baru.
- b) Dampak Negatif
1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
  2. Atmosfer Ketakutan di Masyarakat
  3. Melanggengkan Kultur Kekerasan Aparat
  4. Mengikis Supremasi Hukum
- Dampak negatif yang paling mendasar dari operasi Petrus adalah terjadinya pelanggaran HAM berat. Korban penembakan sering kali dieksekusi tanpa melalui proses hukum atau pengadilan, sehingga dikategorikan sebagai *extrajudicial killing*. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dijamin UUD 1945 dan Deklarasi Universal HAM. Petrus menunjukkan bahwa aparat negara lebih mengedepankan kekerasan daripada supremasi hukum.
- Meskipun kriminalitas menurun, masyarakat justru hidup dalam ketakutan karena siapa pun dapat menjadi target Petrus. Orang yang bertato atau memiliki catatan kriminal bisa saja dicurigai sebagai pelaku kejahatan dan dieksekusi. Situasi ini menciptakan suasana ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Alih-alih merasa aman, banyak orang hidup dalam kecemasan bahwa mereka bisa sewaktu-waktu menjadi korban.
- Operasi Petrus memperkuat budaya kekerasan dalam tubuh aparat keamanan. Penindakan kejahatan dengan cara menembak di tempat dianggap lebih efektif daripada melalui proses peradilan. Hal ini memberi contoh buruk bagi aparat untuk mengedepankan kekerasan dalam menangani persoalan sosial. Kultur semacam ini berpotensi diwariskan dalam praktik penegakan hukum di masa setelahnya.
- Dengan adanya Petrus, posisi hukum dan lembaga peradilan semakin dilemahkan. Eksekusi terhadap para tersangka dilakukan tanpa pembuktian di pengadilan, sehingga hukum seakan-akan tidak lagi menjadi acuan utama. Masyarakat akhirnya kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan yang semestinya menjamin keadilan. Dampaknya, citra negara hukum di Indonesia semakin tergerus oleh praktik kekuasaan yang represif.
5. Menuai Kritik Internasional
- Operasi Petrus juga menimbulkan sorotan tajam dari dunia internasional. Komunitas global mengcam tindakan eksekusi di luar hukum sebagai pelanggaran HAM berat yang tidak bisa dibenarkan. Tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia semakin kuat seiring banyaknya laporan mengenai korban yang dibunuh tanpa proses peradilan. Kritik inilah yang kemudian ikut mendorong pemerintah menghentikan operasi Petrus pada 1985.
6. Menimbulkan Trauma Sosial
- Selain korban langsung, peristiwa Petrus juga meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga dan masyarakat. Banyak keluarga kehilangan anggota tanpa tahu alasan dan proses hukumnya. Trauma sosial ini melekat dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa Timur, yang menyaksikan mayat-mayat misterius ditemukan di jalan, sungai, atau tempat sepi. Ingatan traumatis ini menjadi salah satu warisan kelam kebijakan keamanan Orde Baru.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Penelitian ini membahas mengenai peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) di Jawa Timur dalam Pemberitaan surat kabar Surabaya Post tahun 1983–1985. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penembakan misterius (Petrus) di Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik Indonesia pada awal 1980-an. Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto berupaya mewujudkan stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan ekonomi. Namun, meningkatnya angka kriminalitas oleh pelaku kejahatan, menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk merespons hal tersebut, pemerintah melaksanakan kebijakan *Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK)* atau yang populer disebut *Operasi Celurit*. Kebijakan ini berujung pada praktik penembakan misterius, di mana banyak korban ditemukan tanpa melalui proses hukum. Peristiwa ini menimbulkan atmosfer ketakutan, namun juga dipersepsikan sebagian masyarakat sebagai upaya efektif dalam menekan angka kriminalitas.

Pelaksanaan Petrus di Jawa Timur bermula dari konflik sosial di Jember yang melibatkan masyarakat dengan kelompok dukun santet maupun *bromocorah*. Peristiwa tersebut meluas ke berbagai daerah lain seperti Surabaya, Malang, Madura, Lumajang, dan Pasuruan. Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan jumlah korban terbanyak dalam operasi ini. Aparat keamanan, baik militer maupun kepolisian, berperan dominan dalam pelaksanaan operasi tersebut. Dampaknya, di satu sisi

angka kejahatan jalanan menurun secara signifikan, tetapi di sisi lain menimbulkan trauma sosial, hilangnya rasa aman, dan munculnya perdebatan mengenai praktik kekerasan negara yang dilakukan di luar jalur hukum.

Surabaya Post secara konsisten memberitakan kasus-kasus Petrus di berbagai daerah Jawa Timur. Pemberitaan pada pelaporan fakta penemuan korban, lokasi kejadian, dan reaksi aparat tanpa memberikan opini yang tajam terhadap kebijakan pemerintah. Namun, pemberitaan cenderung mengikuti pola pers Orde Baru yang berhati-hati, tidak secara terang-terangan menyalahkan pemerintah, melainkan menekankan sisi kriminalitas korban. Hal ini menunjukkan posisi Surabaya Post yang relatif pro terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus membuktikan keterbatasan ruang gerak pers di era Orde Baru.

Penelitian ini menegaskan bahwa pemberitaan *Surabaya Post* tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi masyarakat, tetapi juga sebagai rekam jejak sejarah lokal mengenai peristiwa Petrus. Media ini memperlihatkan bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan dalam konteks lokal, sekaligus mencerminkan keterbatasan ruang gerak pers pada masa Orde Baru. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa peristiwa Petrus bukan hanya isu nasional, tetapi juga memiliki dimensi lokal yang khas dan terakam melalui media daerah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peristiwa penembakan misterius di Jawa Timur tahun 1983–1985 merupakan bagian dari strategi keamanan Orde Baru yang menitikberatkan pada stabilitas politik dengan cara represif. Sementara itu, *Surabaya Post* memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, meski berada dalam keterbatasan kebebasan pers. Hal ini menunjukkan adanya tekanan politik terhadap media, sehingga *Surabaya Post* lebih menekankan aspek informatif daripada investigatif. Meskipun demikian, pemberitaan tersebut tetap penting karena mendokumentasikan secara rinci dinamika peristiwa Petrus di berbagai daerah Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian sejarah kontemporer Indonesia, khususnya terkait hubungan antara kebijakan politik, praktik keamanan, dan pemberitaan media massa di era Orde Baru.

## Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dan masyarakat untuk memahami peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) di Jawa Timur, khususnya bagaimana media lokal seperti *Surabaya Post* memberitakan peristiwa tersebut. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga perlu menjadikan kajian ini sebagai bahan pembelajaran sejarah kontemporer, agar generasi muda lebih memahami pentingnya penegakan hukum yang adil serta peran media dalam membentuk opini publik.

Kemudian, pelestarian asrip surat kabar seperti *Surabaya Post* perlu menjadi perhatian serius. Surat kabar lokal memiliki peran penting dalam mendokumentasikan peristiwa-persitiwa sejarah di daerah, yang tidak selalu

terangkat di media nasional. Maka dari itu perpustakaan, lembaga arsip, maupun institusi pendidikan diharapkan dapat mengelola dan menjaga keberlanjutan akses terhadap arsip-arsip media lokal sebagai bagian dari memori kolektif bangsa.

Terakhir, peneliti menyarankan kepada peneliti lain sekira dapat mengembangkan studi serupa dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi wilayah, jenis media, maupun metode analisis. Perbandingan antara pemberitaan media lokal dan nasional, atau antara wilayah Jawa Timur dengan daerah lain yang juga menjadi sasaran Operasi Petrus, dapat memperkaya pemahaman sejarah kekerasan negara. Dengan demikian, kajian tentang Petrus dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif serta memperkaya pemahaman kita mengenai dinamika politik, keamanan, dan media di masa Orde Baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Surat Kabar

- Surabaya Post, 2 Maret 1981. *Kejadian-Kejadian kronologis di Jember*. Hal. 3 kolom 1.
- Surabaya Post, 5 Januari 1983. *Dua Mayat Bertato Ditemukan Terapung*. Hal. 3 kolom 8.
- Surabaya Post, 11 Januari 1983. *Lagi, Ditemukan Mayat Bertato*. Hal. 3 kolom 4.
- Surabaya Post, 18 Januari 1983. *Kopkamtib Turun Tangan*. Hal. 7 kolom 4.
- Surabaya Post, 18 Januari 1983. *Persempit Ruang Gerak Pelaku Kejahanan*. Hal. 12 kolom 5.
- Surabaya Post, 19 Januari 1983. *Brimob Disiapkan Imbangi Ulah Penjahat Brutal*. Hal. 2 kolom 2.
- Surabaya Post, 20 Januari 1983. *“Operasi Clurit” Segera Dilancarkan Untuk Menghadapi Tindak Kejahanan*. Hal. 1 kolom 4.
- Surabaya Post, 21 Januari 1983. *Ditemukan Mayat Tanpa Kepala*. Hal. 2 kolom 5.
- Surabaya Post, 27 Januari 1983. *Komisi I DPR: Situasi Hankam di Jatim Cukup Mantap Namun Kualitas dan Kuantitas Kejahanan Meningkat*. Hal. 1 kolom 5.
- Surabaya Post, 12 Februari 1983. *Situasi Jatim Cukup Mantap*. Hal. 2 kolom 2.
- Surabaya Post, 2 Februari 1983. *Pangkopkamtib: Bukan Berarti Main Hakim Sendiri Masyarakat Diminta Berani Melawan Kejahanan Tindakan Preventif Sangat Menentukan*. Hal. 1 kolom 1.
- Surabaya Post, 8 April 1983. *Melawan, Ditembak Tewas*. Hal. 3 kolom 5.
- Surabaya Post, 29 April 1983. *Bromocorah Ditemukan Tewas Terbunuh*. Hal. 3 kolom 5.
- Surabaya Post, 30 April 1983. *Bromocorah Seluruh Jatim Didata*. Hal. 2 kolom 2.
- Surabaya Post, 20 Mei 1983. *Bromocorah Sanali Tewas Tertembak*. Hal. 12 kolom 1.
- Surabaya Post, 21 Mei 1983. *Pangab-Pangkopkamtib Benny Moerdani: Laksusda Diberi Wewenang Menumpas Kejahanan*. Hal. 1 kolom 1.
- Surabaya Post, 30 Mei 1983. *Seorang Perampok Tewas Dihakimi Massa Ditemukan Mayat dalam Karung*. Hal. 12 kolom 2.

- Surabaya Post, 10 Juni 1983. *Bromocorah S Terpaksa Ditembak*. Hal. 3 kolom 5.
- Surabaya Post, 14 Juni 1983. *Mayat Bertato di Sungai* . Hal. 3 kolom 8.
- Surabaya Post, 29 Juni 1983. *Dua Mayat di Bawah Jembatan*. Hal. 3 kolom 3
- Surabaya Post, 29 Juni 1983. *Mayat Tanpa Kepala*. Hal. 3 kolom 3.
- Surabaya Post, 1 Juli 1983. *Sepertiga dari Jumlah 2.574 Orang Bromocorah Jatim, Terbanyak di Kowil Malang*. Hal. 1 kolom 1
- Surabaya Post, 5 Juli 1983. *Laksusda Jatim: Operasi Penumpasan Kejahatan Jalan Terus*. Hal. 1 kolom 1.
- Surabaya Post, 6 Juli 1983. *Empat Mayat Ditemukan Dua Tak Dikenal, Tertembus Peluru*. Hal. 2 kolom 5.
- Surabaya Post, 6 Juli 1983. *Mayat dengan Luka Tembak*. Hal. 3 kolom 5.
- Surabaya Post, 15 Juli 1983. *Ditemukan Mayat Bertato di Lereng Gunung Kemitir*. Hal. 2 kolom 2.
- Surabaya Post, 18 Juli 1983. *Mayat Bertato Diduga SUK*. Hal. 3 kolom 1.
- Surabaya Post, 21 Juli 1983. *Pendapat Tiga Ahli Hukum Tentang Penembak Misterius*. Hal. 1 kolom 4
- Surabaya Post, 23 Juli 1983. *Mayat Lagi*. Hal. 3 kolom 9.
- Surabaya Post, 28 Juli 1983. *KH. Atje Sadeli: 'Penembakan Misterius' Tidak Bertentangan dengan Islam*. Hal. 1 kolom 4.
- Surabaya Post, 29 Juli 1983. *Pangdam VIII dan Kadapol X Belum Ada Laporan Hilang-Tewas Bromocorah di Jatim*. Hal. 1 kolom 7
- Surabaya Post, 1 Agustus 1983. *Ditemukan 8 Korban Tewas dalam Tiga Hari*. Hal. 1 kolom 4
- Surabaya Post, 3 Agustus 1983. *Pertama Kali Ditemukan Mayat Wanita yang Tertembus Peluru*. Hal. 1 kolom 1
- Surabaya Post, 1 September 1983. *Kapolri: Utamakan Penanganan Kejahatan yang Langsung Meresahkan Masyarakat*. Hal. 4 kolom 7
- Surabaya Post, 7 September 1983. *Dua Mayat Terbungkus*. Hal. 2 kolom 9.
- Surabaya Post, 20 September 1983. *Ditemukan Tewas*. Hal. 3 kolom 6.
- Surabaya Post, 24 September 1983. *Ditemukan Mayat Dalam Karung*. Hal. 3 kolom 8.
- Surabaya Post, 6 Oktober 1983. *Dua Orang Ditemukan Tewas*. Hal. 3 kolom 5.
- Surabaya Post, 24 Oktober 1983. *Lagi, Tiga Mayat di Pamekasan*. Hal. 3 kolom 4
- Surabaya Post, 7 November 1983. *Kadapol X Mayjen Pol. Soedarmadji di Malang: Menurunnya Angka Kriminalitas di Jatim Hasil Operasi Bersama*. Hal. 3 kolom 1.
- Surabaya Post, 6 Januari 1984. *Dari Rakor Polkam: Penembakan Misterius Sebenarnya Tidak Ada*. Hal. 1 kolom 7
- Surabaya Post, 11 Januari 1984. *Dengar Pendapat Ketua DPRD Jatim dengan LBH "Shock Therapy" untuk Atasi Kejahatan Disalahgunakan*. Hal. 1 kolom 1
- Surabaya Post, 20 Januari 1984. *Dua Mayat Ditemukan*. Hal. 2 kolom 7
- Surabaya Post, 23 Januari 1984. *Yang Pernah Melakukan Kejahatan Menyerahlah*. Hal. 2 kolom 2
- Surabaya Post, 15 Februari 1984. *Mayat Didekat Jembatan*. Hal. 3 kolom 5.
- Surabaya Post, 23 Maret 1984. *Pangab Moerdani: Perlu Diciptakan Suasana untuk Mewujudkan Tertib Hukum*. Hal. 1 kolom 1
- Surabaya Post, 18 Juni 1984. *Empat Mayat di Kebun Tebu*. Hal. 2 kolom 8.
- Surabaya Post, 25 Juni 1984. *Mayat Tak Dikenal Dikubur di Putat Jaya*. Hal. 2 kolom 2
- Surabaya Post, 18 Juli 1984. *Kapolri Anton Soedjarwo: Perlu, Upaya Paksa Terhadap Pelanggar Hukum*. Hal. 1 kolom 1
- Surabaya Post, 7 Agustus 1984. *Ditemukan 2 Mayat*. Hal. 3 kolom 7
- Surabaya Post, 3 November 1984. *Diduga Kelas Kakap*. Hal. 3 kolom 3.
- Surabaya Post, 8 November 1984. *Mayat Di Rumpun Bambu*. Hal. 3 kolom 5.
- Surabaya Post, 23 November 1984. *Menurun, Kejahatan dengan Senjata Api*. Hal. 2 kolom 8.
- Surabaya Post, 28 Januari 1985. *Ditemukan Empat Mayat*. Hal. 12 kolom 1
- Surabaya Post, 22 Februari 1985. *Sukidjan Ditemukan Tewas di Hutan*. Hal 3 kolom 1.
- Surabaya Post, 8 Mei 1985. *Mayat dalam Karung*. Hal. 3 kolom 3.
- Surabaya Post, 10 Juni 1985. *Ditemukan Mayat Laki-Laki*. Hal. 3 kolom 8.
- Surabaya Post, 18 September 1985. *Mayat Terdampar di Desa Junganyar*. Hal. 7 kolom 7.

## B. Buku

- Gaffar, Affan. 1999. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marijan, Kacung, "Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru". (Jakarta, Kencana: 2010), hlm. 290
- Muslim Mufti, M.Si. 2013. *Kekuatan Politik di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Wibisono, A. A. (2009). Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara. Jakarta: IDSPA, DCAF.

## C. Artikel dan Jurnal

- Agustian, R. A. 2011. "Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dalam Perspektif Delik Politik di Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3).
- Anwar, A. 2018. "Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia". *Jurnal Adabiya*, 20(1).
- Darmono, B. 2010. "Konsep dan sistem keamanan nasional Indonesia". *Jurnal Ketahanan Nasional*, 15(1), 1-42.
- Devi-Ardhiani, Y. 2012. "Potret Relasi Gali-Militer di Indonesia (Ingatan Masyarakat Yogyakarta tentang Petrus 1983)". *Retorik*, 3(1), 37-58.

- Effendy, T. 2013. "Premanisme dan Pembangunan Politik di Indonesia". *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 5(9).
- Hadi, D. W., & Kasuma, G. (2012). "Propaganda Orde Baru 1966-1980". *Media Verleden*, 1(1).
- Harunurrasyid, H. 2013. "Pengaruh perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap tingkat inflasi di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 78-90.
- Leni, N. 2012. "DEMOKRASI DAN BUDAYA POLITIK LOKAL DI JAWA TIMUR MENURUT R. ZUHRO, DKK". *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 8(1), 20-39.
- Mahanum, M. 2021. "Tinjauan kepustakaan". *ALACRITY: Journal of Education*, 1-12.
- Mubyarto, M. 2000. "Siklus tujuh tahunan ekonomi Indonesia (1931-1966-2001-2036)". *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 16(3).
- Mukhtar, S. 2017. "Keamanan Nasional: Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia". *Sociae Polites*, 1(1), 127-137.
- Nasoha, dkk. 2024. "Pancasila Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi". *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 2(4), 32-55.
- Nuryasman, M. N., & Wiweko, H. 2001. "Deregulasi Di Indonesia Perkembangan dan Dampaknya Terhadap Perbankan". *Jurnal Ekonomi*, 6(1), 35-52.
- Rajab, B. 2004. "Negara orde baru: berdiri di Atas sistem ekonomi dan politik yang rapuh". *Sosiohumaniora*, 6(3), 182.
- Rizqi, R. 2022. "Efektifitas Penyederhanaan Partai Politik Era Orde Baru". *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(03), 204-211.
- Rosa, D. V. 2022. "Pancasila dan politik toleransi Orde Baru". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol*, 6(01).
- Saptahadi, S. 2011. "Pasang surut kebebasan pers di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 127-138.
- Wilujeng, S. R. 2013. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis". *Humanika*, 18(2).

#### D. Internet

<https://amingaminoedhin.blogspot.com/2012/02/harian-sore-surabaya-post.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024 pukul 10.10 WIB.

<https://www.kpu.go.id/page/read/10/pemilu-1977-1997>  
diakses pada tanggal 01 Mei 2025 pukul 09.00 WIB.

Provinsi Jawa Timur "Sejarah Singkat Provinsi Jawa Timur" dalam <https://jatimprov.go.id/profile>  
diakses pada tanggal 01 Mei 2025 pukul 09.15 WIB.

